



Kesiapan Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Fasilitas Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan

Fitria Nur Anggraeni¹✉

¹Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Oktober 2016
Disetujui Desember 2017
Dipublikasikan Februari 2017

Keywords:

Readiness, Financial
Inclusion, PKH, Emoney

Abstrak

Akses masyarakat terhadap lembaga keuangan merupakan salah satu kunci terwujudnya sistem keuangan yang stabil. Namun data OJK (2015) menunjukkan hanya 41% masyarakat Jawa Tengah yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. BAPPENAS, BI dan Kementerian Sosial bekerjasama mengkombinasikan uang elektronik dan telepon genggam dalam penyaluran dana Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan keuangan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan masyarakat, manfaat dan hambatan penggunaan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengambilan sampel populasi. Teknik pengambilan data primer yang digunakan antara lain kuesioner, Forum Group Discussion, Observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi persentase. Hasil penelitian diperoleh bahwa seluruh responden menyatakan sudah siap menggunakan uang elektronik karena memberikan manfaat efisiensi dan efektifitas serta menjadi jembatan awal bagi masyarakat unbanked untuk masuk kedalam sektor keuangan sedangkan kendala yang masih dihadapi masyarakat belum memiliki pengetahuan mengenai uang elektronik serta masih ada yang belum memiliki telepon genggam. Untuk itulah diperlukan peningkatan literasi keuangan agar program tersebut dapat dilaksanakan.

Abstract

Public access to financial institutions is one key to the realization of a stable financial system. But OJK (2015) showed only 41% of people in Central Java who have access to formal financial institutions. Bappenas, BI and Kementerian Sosial collaboration to combines emoney and mobile phones in the disbursement of funds PKH for increase financial inclusion. This study aims to determine the readiness of the community, benefits and barriers to the use of electronic money in the disbursement of funds CCT Genting Village, District Jambu, Semarang. Penelitian district uses primary data by sampling techniques populations. Primary data collection techniques used include questionnaires, Forum Group Discussion, Observations. Data analysis technique used is persentase. Hasil description analysis showed that all respondents stated are ready to use electronic money for the benefit of efficiency and effectiveness as well as being a bridgehead for unbanked people to enter into the financial sector, while challenges still faced people had no knowledge about the electronic money and there are those who do not yet have mobile phones. That's necessary to increase financial literacy so that the program can be implemented.

© 2017 Universitas Negeri Semarang

ISSN 2252-6965

✉Alamat korespondensi:

Gedung Ali Wardana, Nomor. 2-4
Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta
E-mail: Fitria.aang@gmail.com

PENDAHULUAN

Kuangan inklusif menurut SNKI (2012) merupakan upaya mewujudkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan untuk mengurangi kerentanan dan ketidakmampuan ekonomi serta untuk mengurangi kemiskinan. Kemudahan akses masyarakat terhadap layanan keuangan secara inklusif dimana tidak ada lagi batasan bagi setiap orang untuk mendapatkan akses keuangan secara penuh diharap mampu menciptakan sistem keuangan yang stabil dan optimal sehingga dapat mendorong peningkatan perputaran modal yang nantinya dapat pemeratakan modal sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan dalam masyarakat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun saat ini Indonesia masih berada pada tahap keuangan inklusif yang masih rendah. Menurut survei yang dilakukan oleh *World Bank* ditahun 2014 baru 36% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal sedangkan menurut OJK pada tahun 2015 sebesar 59,7%, jika dibandingkan dengan Negara-Negara di kawasan ASEAN, angka tersebut masih dibawah Singapore yang mencapai 96%, Malaysia 81% dan Thailand 78% (*Word Bank*, 2014).

Berbagai program dicanangkan oleh TP2NK sebagai upaya peningkatan tingkat keuangan salah satunya adalah program **Layanan Keuangan Digital (LKD) melalui Agen LKD** sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 mengenai penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) dalam rangka keuangan inklusif melalui Agen LKD. Konsep Layanan Keuangan Digital yang dimaksud berdasarkan Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang bekerjasama dengan pihak ketiga atau yang disebut dengan Agen LKD dengan memanfaatkan teknologi berbasis *mobile based* maupun *web based*. Salah satu layanan yang diberikan Agen LKD adalah penyaluran dana Pemerintah kepada masyarakat.

Di Indonesia penggunaan uang elektronik sebagai suatu inovasi dalam sistem pembayaran mendapat respon positif dari masyarakat .Hal tersebut ditunjukkan dari penggunaan uang elektronik yang mengalami kenaikan disetiap

tahunnya. Sejak diterbitkan di tahun 2008 sampai dengan tahun 2015. Selain dari sisi pengguna, uang elektronik merupakan peluang dan potensi bagi penyedia layanan uang elektronik, hal tersebut dapat terlihat dari jumlah penyedia layanan uang elektronik baik lembaga perbankan maupun lembaga bukan bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Bank Indonesia yang sampai tahun 2015 sebanyak duapuluh. Uang elektronik berbasis telepon genggam dipilih karena saat ini di 33 Indonesia telepon genggam menjadi unsur tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam BPS (2014) selama periode 2013 hingga 2014 persentase rumah tangga yang memiliki telepon genggam di wilayah perdesaan meningkat dari 79,42% menjadi 81,33% sedangkan di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan dari 80,78 menjadi 82,46.

Salah satu bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan bantuan sosial yang dijalankan sejak tahun 2007 di bawah komando Kementrian Sosial. PKH ditujukan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) agar dapat keluar dari garis kemiskinan, tetapi juga memperbaiki taraf hidup dan memastikan generasi berikutnya menyelesaikan pendidikan dasar (Husnaprawira, 2014).

Marmujiono (2015) menyebutkan untuk pengentasan kemiskinan diperlukan pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan dan akses terhadap layanan keuangan. Saat ini penyaluran dana PKH masih melalui PT. POS . Kedepan Bank Indonesia, BAPPENAS, Kemensos, TNP2K, BRI serta Bank Mandiri bekerjasama untuk menyalurkan dana bantuan sosial PKH di Indonesia melalui mekanisme alternatif dengan *mobile money* yang bekerjasama dengan Agen LKD dalam rangka Keuangan Inklusif serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyaluran bantuan pemerintah.

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan uji coba penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat penerima Program Keluarga Harapan melalui *pilot project* pada empat provinsi di Indonesia yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan NTT dengan karakteristik di wilayah perkotaan. Dalam evaluasinya, Pemerintah berkomitmen memperluas lokasi penyaluran

bantuan menggunakan uang elektronik pada level yang lebih luas (BAPPENAS,2015) sehingga diperlukan suatu analisis lebih lanjut mengenai kesiapan penggunaan uang elektronik terutama diwilayah dengan karakteristik di perdesaan. Ketidaksiapan masyarakat penerima dana PKH dalam menggunakan uang elektronik akan menyebabkan program tersebut tidak dapat diimplementasikan secara nasional.

Salah satu perluasan wilayah penggunaan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH adalah Jawa Tengah yang merupakan Provinsi terbesar ketiga di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian oleh Deloitte (2014) tingkat populasi penduduk Jawa Tengah mencapai 32,6 juta jiwa dengan PDRB per kapita yang mencapai 19 juta, sedangkan masyarakat yang belum mengakses perbankan mencapai 14,2 juta jiwa dengan penetrasi telepon genggam (*mobile*) 91% dari jumlah penduduk. Menurut OJK (2015) indeks inklusi Jawa Tengah sebesar 42% dibawah nasional yaitu sebesar 59,7%. Salah satu penyumbang terbesar kelima PDRB di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Semarang, dengan penduduk yang mencapai 1000,89 ribu jiwa, baru 133.157 jiwa atau setara dengan 13,3% penduduknya yang sudah memiliki rekening dilembaga perbankan (BPS, 2015).

Keberhasilan Program Keluarga Harapan juga tidak lepas dari peran serta Pendamping PKH. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pendamping tahunan dibawah Kementerian Sosial, Kecamatan Jambu merupakan Kecamatan yang memiliki pendamping terbaik di Kabupaten Semarang pada tahun 2015. Sedangkan Desa Genting dipilih karena berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang tahun 2014, Desa Genting merupakan desa di Kecamatan Jambu dengan jumlah masyarakat penerima PKH tertinggi kedua setelah Desa Bedono yaitu sebanyak 29 orang.

Saat ini, dana PKH disalurkan melalui Kantor Pos yang ada di Desa Jambu namun jarak Desa Genting Desa yang mempunyai jarak paling jauh ke dua yaitu 6,90 km setelah Desa Gemawang 8,20 km dengan sarana perekonomian seperti kantor pos, perbankan, pasar, puskesmas dan pusat pemerintahan yang ada di Desa Jambu.

Selain itu, Desa Genting juga memiliki karakteristik lokasi yang berbukit dan tidak

tersedia transportasi umum serta sarana perbankan dan perekonomian lainnya (BPS,

2015). Berdasarkan karakteristik tersebut,, diharapkan Desa Genting dapat menggambarkan karakteristik desa-desa di wilayah lain.

Untuk itulah diperlukan suatu penelitian mengenai bagaimana kesiapan masyarakat;apamanfaat ekonomi yang diperoleh dan apa hambatan dari penggunaan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapan masyarakat, manfaat ekonomi yang diperoleh dan hambatan dalam penyaluran dana PKH melalui uang elektronik. keuangan inklusif dapat dilaksanakan sehingga program tersebut dapat diimplementasikan dan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat diperoleh manfaat serta menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan dan kebijakan strategis pada sektor keuangan khususnya di bidang *financial inclusion*.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan sektor keuangan khususnya dibidang *financial inclusion*.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruhpenerima dana PKH di Desa Genting yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) keluarga sangat miskin. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel populasi.

Variabel penelitian ini meliputi: kesiapan penggunaan, uang elektronik dan keuangan inklusif.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data primer antara lain Kuesioner, *Forum Group Discussion*, dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa sumber data dan literatur seperti data dari World Bank, BPS, BAPPENAS, TNP2K, OJK.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Persentase. Analisis persentase merupakan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data primer yang telah diperoleh melalui kuesioner, tujuannya melakukan perbandingan bagian-bagian kecil terhadap total yang diolah dengan cara frekuensi dari masing-masing variabel dibagi dengan jumlah responden dikali

100 persen, seperti dikemukakan Sudjana (2005) adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase

f : Frekuensi

N : Jumlah responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan profil responden berdasarkan usia, pendidikan dan pekerjaan, responden yang merupakan masyarakat penerima dana PKH di Desa Genting didominasi oleh usia produktif dengan tingkat pendidikan yang masih rendah dan pekerjaan responden sebagai Ibu rumah tangga dan Petani seperti yang dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Identitas Responden

	Indikator	Jumlah responden	Persentase
Usia (Tahun)	18-30	2	9,1%
	31-42	9	40,9%
	43-54	11	50%
	55-62	0	0
	63-79	0	0
Pendidikan	Tidak tamat SD	2	9,1%
	Tamat SD	18	81,9%
	Tamat SMP	1	5%
	Tamat SMA	1	5%
	Perguruan Tinggi	0	0
Pekerjaan	Ibu rumah tangga	8	36,36%
	Buruh	7	31,81%
	Petani	5	22,72%
	Wirausaha	2	9,09%
	PNS	0	0

Sumber : Lampiran 9, diolah.

Kesiapan Penggunaan Uang Elektronik

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan pada variabel kesiapan penggunaan uang elektronik pada indikator kepemilikan telepon genggam, intensitas penggunaan, penggunaan fitur pada telepon genggam, kesiapan dan pendapat masyarakat seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.

Berdasarkan indikator indikator pada variabel kesiapan pada Tabel 4.2 dapat digambarkan bahwa masyarakat penerima dana PKH di Desa Genting sudah dapat dinyatakan siap untuk menggunakan uang elektronik dan menganggap penggunaan uang elektronik mudah namun belum seluruh responden memiliki telepon genggam sebagai media utama uang elektronik.

82% responden sudah memiliki telepon genggam dan dari sudah memiliki telepon

genggam sebagian besar digunakan selama kurang dari tiga jam dalam satu hari dan menunjukkan bahwa kepemilikan telepon genggam digunakan dan fitur yang digunakan oleh seluruh responden adalah SMS dan telepon. Penggunaan fitur pesan singkat dapat mendorong kesiapan penggunaan elektronik.

Manfaat Penggunaan Uang Elektronik dalam Penyaluran Dana PKH

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan pada variabel keuangan inklusif pada indikator jarak, alat transportasi dan biaya yang harus dikeluarkan responden saat mengambil dana PKH di Kantor Pos serta kepemilikan rekening lembaga keuangan formal seperti yang dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 2. Kesiapan Masyarakat dalam Penggunaan Uang Elektronik

Indikator		Jumlah responden	Persentase
Kepemilikan Telefon genggam	Sudah memiliki	18	82%
	Belum memiliki	4	18%
	< 3 Jam	17	94,4%
Intensitas penggunaan telepon genggam	4-6 Jam	1	5,6%
	7-8 jam	0	0
	9-12 Jam	0	0
	> 12 Jam	0	0
	SMS dan Telefon	18	100%
Penggunaan fitur pada telepon genggam	SMS, Telefon dan Internet (<i>Browsing</i>)	0	0
	Hiburan	0	0
	Transaksi keuangan	0	0
	Hanya sekedar memiliki	0	0
	Sangat siap	0	0
	Siap	22	100%
	Netral	0	0
	Tidak siap	0	0
	Sangat tidak siap	0	0
	Sangat mudah	5	23%
Kesiapan masyarakat	Mudah	15	68%
	Netral	2	9%
	Tidak siap	0	0
	Sangat tidak siap	0	0
Pendapat masyarakat tentang penggunaan uang elektronik			

Sumber : Lampiran 9, diolah.

Manfaat Penggunaan Uang Elektronik dalam Penyaluran Dana PKH

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan pada variabel keuangan inklusif pada indikator jarak, alat transportasi dan biaya yang harus dikeluarkan responden saat mengambil dana PKH di Kantor Pos serta kepemilikan rekening dilembaga keuangan formal seperti yang dijelaskan pada Tabel 3 .

Pada tabel 3 tersebut dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden harus menempuh jarak yang cukup jauh serta mengeluarkan biaya transportasi serta sebagian besar responden belum memiliki rekening dilembaga keuangan formal. Seperti yang telah diungkapkan oleh Wahid (2015) dalam teori perilaku masyarakat (*firm behaviour theory*) skema penggunaan uang elektronik yang bekerjasama dengan agen LKD dalam rangka keuangan inklusif dapat memberikan dampak efisiensi dan

efektifitas. Dampak efektifitas dapat diperoleh dari skema tersebut adalah masyarakat lebih dekat saat mengambil dana PKH karena dapat dilakukan di agen LKD terdekat dengan tempat tinggal dan tidak harus ke Kantor Pos. Sedangkan manfaat dari segi efisiensi, skema tersebut dapat memangkas biaya yang dikeluarkan untuk mengambil dana PKH.

Selain itu dengan adanya Agen LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi keberadaan bank atau ATM secara fisik. Masyarakat dapat mengambil dana PKH yang disalurkan dengan mudah tanpa ada batasan tempat dan waktu pengambilan karena dengan uang elektronik, dana PKH dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak perlu mengantre sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Uang elektronik juga akan meningkatkan akuntabilitas karena dana bantuan dapat dikirim langsung ke rekening pribadi dan meminimalisir ruang untuk

pungutan liar. Uang elektronik juga menjadi jembatan awal masyarakat dapat meregistrasi *database* untuk membuka rekening ke dalam lembaga keuangan formal dan mengakses layanan dalam lembaga keuangan.

Kombinasi uang elektronik dan telepon genggam memudahkan masyarakat untuk registrasi karena nomor telepon yang digunakan dalam telepon genggam sekaligus sebagai nomor rekening.

Tabel 3. Jarak, Alat Transportasi, Biaya yang Dikeluarkan saat Pengambilan Dana PKH dan Kepemilikan Rekening di Lembaga Keuangan

Indikator		Jumlah	Persentase (%)
		Responden	
Jarak (menit)	<15	3	13.63
	15-30	0	0
	30-45	8	36.36
	45-60	8	36.36
	>60	2	9.09
Alat Transportasi	Jalan kaki	1	4.5
	Sepeda	0	0
	Sepeda Motor	21	95.5
	Angkutan umum	0	0
	Mobil	0	0
Biaya yang dikeluarkan (ribu rupiah)	<5	0	0
	5-10	1	4.5
	11-15	4	18.1
	16-20	14	63.63
	>20	3	13.6
Kepemilikan Rekening di Lembaga Keuangan	Sudah	8	36.4
	Belum	14	63.6

Sumber: Lampiran 9, diolah

Pada tabel 1.3 tersebut dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden harus menempuh jarak yang cukup jauh serta mengeluarkan biaya transportasi serta sebagian besar responden belum memiliki rekening di lembaga keuangan formal.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Wahid (2015) dalam teori perilaku masyarakat (*firm behaviour theory*) skema penggunaan uang elektronik yang bekerjasama dengan agen LKD dalam rangka keuangan inklusif dapat memberikan dampak efisiensi dan efektifitas.

Dampak efektifitas dapat diperoleh dari skema tersebut adalah masyarakat lebih dekat saat mengambil dana PKH karena dapat dilakukan di agen LKD terdekat dengan tempat tinggal dan tidak harus ke Kantor Pos. Sedangkan manfaat dari segi efisiensi, skema

tersebut dapat memangkas biaya yang dikeluarkan untuk mengambil dana PKH.

Selain itu dengan adanya Agen LKD, masyarakat tidak lagi dibatasi keberadaan bank atau ATM secara fisik.

Masyarakat dapat mengambil dana PKH yang disalurkan dengan mudah tanpa ada batasan tempat dan waktu pengambilan karena dengan uang elektronik, dana PKH dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak perlu mengantre sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan.

Uang elektronik juga akan meningkatkan akuntabilitas karena dana bantuan dapat dikirim langsung ke rekening pribadi dan meminimalisir ruang untuk pungutan liar.

Uang elektronik juga menjadi jembatan awal masyarakat dapat meregistrasi *database*

untuk membuka rekening ke dalam lembaga keuangan formal dan mengakses layanan dalam lembaga keuangan. Kombinasi uang elektronik dan telepon genggam memudahkan masyarakat untuk registrasi karena nomor telepon yang digunakan dalam telepon genggam sekaligus sebagai nomor rekening.

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan variabel uang elektronik berdasarkan indikator masyarakat mengenal uang elektronik, gambaran pertama uang elektronik dan pengetahuan masyarakat terhadap rencana penggunaan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH dijelaskan pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 4. Pengetahuan Masyarakat tentang Uang Elektronik

Indikator			Jumlah Responden	Persentase (%)
Masyarakat Mengenal Uang Elektronik	Sudah	Sudah	0	0
	Uang	Belum	22	100%
		ATM	5	23%
Gambaran Pertama Uang Elektronik		Transfer Uang	11	50%
		Penarikan Uang	1	4%
		Kode PIN	0	0
		Tidak mengerti	5	23%
Pengetahuan tentang rencana penggunaan uang elektronik dalam transfer Dana PKH		Sudah	0	0
		mengetahui		

Belum adanya pengetahuan dari masyarakat terkait penggunaan uang elektronik serta ditambah dengan profil responden yang masih memiliki tingkat pendidikan rendah menjadi penghambat pelaksanaan program. Pengetahuan masyarakat dalam menggunakan uang elektronik sangat diperlukan agar program dapat berjalan lancar sehingga dapat diperoleh. Seperti yang telah diungkapkan oleh Wahid (2015) salah satu tahap untuk mewujudkan keuangan inklusif adalah literasi atau kemampuan untuk memahami produk dan profil keuangan yang salah satunya adalah penggunaan uang elektronik berbasis telepon genggam untuk transaksi transfer pemerintah ke masyarakat. Diperlukan penyusunan program sosialisasi untuk pengenalan uang elektronik kepada masyarakat. Sedangkan untuk meningkatkan tingkat literasi atau pengetahuan terhadap layanan keuangan diperlukan program edukasi penggunaan layanan uang elektronik kepada masyarakat baik melalui media cetak seperti majalah, buku, koran serta melalui media elektronik seperti iklan layanan masyarakat dan video edukasi.

Selain hambatan dari segi pengetahuan, hambatan lain adalah masih ada masyarakat yang

belum memiliki telepon genggam sebagai media utama penggunaan uang elektronik yaitu masih terdapat 19% responden yang belum memiliki telepon genggam. Disisi lain masyarakat sudah menyatakan kesiapannya dalam menggunakan uang elektronik. Hal tersebut dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pembayaran dana PKH melalui uang elektronik. Dari hambatan tersebut diharapkan, rencana penggunaan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH dapat dikontrol dan dievaluasi kembali serta dibutuhkan koordinasi antar pihak agar program dilanjutkan sehingga strategi penggunaan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH yang bertujuan untuk meningkatkan keuangan inklusif dapat segera diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia. Terlebih masyarakat maupun pihak terkait seperti Bank BRI sudah menyatakan kesiapannya dalam menggunakan uang elektronik. Selain hambatan dari segi pengetahuan, hambatan lain adalah masih ada masyarakat yang belum memiliki telepon genggam sebagai media utama penggunaan uang elektronik yaitu masih terdapat 19% responden yang belum memiliki telepon genggam. Disisi lain masyarakat sudah menyatakan kesiapannya dalam menggunakan

uang elektronik. Hal tersebut dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan pembayaran dana PKH melalui uang elektronik.

Dari hambatan tersebut diharapkan, rencana penggunaan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH dapat dikontrol dan dievaluasi kembali serta dibutuhkan koordinasi antar pihak agar program dilanjutkan sehingga strategi penggunaan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH yang bertujuan untuk meningkatkan keuangan inklusif dapat segera diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia. Terlebih masyarakat maupun pihak-pihak terkait seperti Bank BRI sudah menyatakan kesiapannya dalam menggunakan uang elektronik.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh beberapa simpulan bahwa seluruh masyarakat penerima dana PKH di Desa Genting sudah dapat dinyatakan siap untuk menggunakan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH dan diharapkan program tersebut dapat diimplementasikan segera. Selain masyarakat, pemerintah daerah dan perbankan penyelenggara juga siap mendukung terlaksananya program. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari penggunaan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH adalah efektifitas dan efisiensi dari segi biaya transportasi, jarak tempuh lebih dekat, notifikasi penyaluran dana dapat lebih cepat, uang dapat diambil sewaktu-waktu, kemudahan transfer, serta menjadi jembatan awal masyarakat untuk masuk ke dalam sektor keuangan dengan kepemilikan rekening di lembaga keuangan formal yang menjadi pintu masuk untuk mengakses layanan keuangan seperti tabungan dan kredit.

Kendala penggunaan uang elektronik dalam penyaluran dana PKH adalah masih ada masyarakat yang belum memiliki telepon genggam dan masyarakat yang belum memiliki pengetahuan mengenai uang elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS kabupaten Semarang . 2014. *Kecamatan Jambu dalam Angka 2014*. Ungaran : Badan Pusat Statistik
- Harris, Hezlin., Guru, Balachander Krishnan., Avvari, Mohan V. 2011. Evidence of Firms' Perceptions Toward Electronic Payment Systems (EPS) in Malaysia International *Journal of Business and Information*; Sansia Vol. 6, Iss. 2, 226-245.
- Hawk, Stephen. 2004. A Comparison of B2C E-Commerce in Developing Countries. *Electronic Commerce Research*. Vol. 4 (3) pp. 181-199
- Hidayati, Siti, dkk. 2006. *Operasional E-Money*. Jakarta: Bank Indonesia
- Husnaprawira, Rangga. 2014. Pelatihan Melek Keuangan Berbasis Komunitas Bagi Anggota Program Keluarga Harapan Sebagai Langkah Mandiri Penanggulangan Kemiskinan. Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Berprestasi. Depok: Universitas Indonesia
- Irmawati, S., Damelia, D., & Puspita, D. (2013). Model Inklusi Keuangan Pada Umkm Berbasis Pedesaan. *Jejak: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 6(2). doi:http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v6i2.3885
- Marmujiono, S. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kab. Brebes Tahun 2009-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 3(4). doi:http://dx.doi.org/10.15294/edaj.v3i4.3221
- Tarunajaya, Chairil. 2015. *The future is now: Digital Financial Services in Indonesia* . Jakarta: Delloite
- Tim inisiatif Bank Indonesia. 2006. Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai melalui Pengembangan E-Money (Working Paper). Jakarta: Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/DPAU mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 69. 2014. Jakarta
- Purcell, Fuatai., Toland, Janet. 2004. Electronic Commerce for the South Pacific: A Review of E-Readiness. *Electronic Commerce Research* Vol. 4 (3) pp 241-262.
- Wahid, Nurson. 2015. Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan. Jakarta: PT Gramedia.